

DAFTAR PUSTAKA

1. Asiah N. Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum. 2017;5(1):55-66.
2. Prayoga AS, dkk. Efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19 di Inonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan. 2021;10(1).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Saputra, Trio. Capaian Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kota Pekanbaru. 2017;16(1).`
5. Triyono, Samuel DK dan Herdiyanto Y. Konsep Sehat dan Sakit Pada Individu. Jurnal Psikologi. 2017;4(2):263- 276.
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
7. Maulana HR. Promosi Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran; 2007. Hal.4
8. Ariga RA. Manajemen Pelayanan Kesehatan. Sleman: Penerbit Deepublish; 2020. Hal. 2
9. Nopiani, dan Sasmito C. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi. 2019;7(1):2089-0532
10. Sawitri, A.A.S. Ilmu Kesehatan Masyarakat & Ilmu Kedokteran Pencegahan. Yogyakarta : Lontar Mediatama. 2020
11. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Buku Panduan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jakarta: 2016. Hal. 4
12. Kusumaningruma A dan Zinar M. Kepesertaan Masyarakat Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Secara Mandiri. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat. 2018;2(1).
13. Rohmatullailah D, dkk. Peningkatan Pengetahuan Tentang JKN dengan Sosialisasi dan Pembentukan Kader JKN Kota Bogor. Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat. 2021;1(4):110-118

14. Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
15. Purnomo M, Hartina D dan Suwanto T. Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien BPJS Puskesmas Pecangaan Jepara. *Jurnal Perawat*. 2023;8(1):33-48.
16. Nugraheni W.P dan Hartono R.K. Analisis Pola Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Pada Tahun Pertama Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 2017;27(1):9-16.
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
18. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
19. Wowor H, Liando D.M dan Rares J. Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*. 2016;3:2337-4004.
20. Sholihah, Nurfarida dan Khodijah, Siti. Hubungan Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Terhadap Kepuasan Pasien BPJS di Poliklinik Jantung Rumah Sakit Islam Bogor Tahun 2019. *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*. 2020;3(6).
21. Retno Y. Persepsi Pasien Rawat Jalan Terhadap Pelayanan Kesehatan Di RSUD Rokan Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Sosiologi Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. 2017;4(1).
22. Armansyah S.L, dkk. Evaluasi Implementasi dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pada Pasien Rawat Jalan BPJS Kesehatan di Instalasi Farmasi RSUD dr.A.Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. 2021;6(3):2548-1398.
23. Mendrofa D.E dan Suryawati C. Analisis Pengelolaan Obat BPJS di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Panti Cilasa Citarum Semarang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*. 2016;4(3).

24. Rofi'i, M dan Jarihatunningsih S. Jangka Waktu Yang Di Perlukan Pasien Untuk Pelayanan Di Bagian Rawat Jalan Pada Rumah Sakit Pemerintah di Semarang. *Jurnal Manajemen Keperawatan*. 2014;2(2):109-115.
25. Arifah N, Anggreani R dan Mangilep A.U.A. Studi Implementasi Sistem Rujukan Berjenjang Antar Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut di Era JKN di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*. 2021;9(1).
26. Fahamsyah D, Hatta C.I dan Mahyuliansyah. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*. 2018;6(2):189-196.
27. Agustina D, dkk. Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. *Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*. 2023;1(3):2963-2005.
28. Azza F, dkk. Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. 2021;4(2):2655-6022.)
29. Noeng Muhadjir. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Raka Sarasin, th 2000. Hal.15.)
30. Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15.
31. Iskandar S. Pelayanan Kesehatan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2016;4(2):2477-2631.
32. Maulana, S. Pengantar Ilmu Kedokteran. Widina : Bandung. 2023
33. Apt. Ervianingsih, S.Farm, dkk. Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung; 2020. Hal. 227.
34. Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, Ed 3, (Jakarta : Binarupa Aksara,1996). Hal.16.
35. Arief Suryono, 2008, “Asuransi Kesehatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991”, HUMANIS, Jurnal Sosial Ekonomi Humaniora,

- Volume 2 Nomor 2, Nopember 2008, Purwokerto: Lembaga Penelitian Universitas Jenderal Soedirman, Hal. 102
36. Riskana T. Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan. Jurnal Fakultas Hukum. 2020.
 37. Murtikasari A.P. BPJS Kesehatan Memberikan Jaminan Kesehatan Terhadap Pasien atau Masyarakat. Jurnal Universitas Sebelas Maret. 2021;7(2).1979-2115.
 38. Solechan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. Jurnal Fakultas Hukum. 2019;2(4):2621-2781.
 39. Kemenkes-RI. 2014. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Jakarta : Kemenkes-RI.
 40. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
 41. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 4 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 42. Marliani L. Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. Jurnal Ilmu Politik.
 43. Warsono H, Astuti.R.N dan Marom A. Buku Ajar Teori Administrasi. (Semarang, 2019) Hal. 1.
 44. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional, Poin F tentang Prosedur Pelayanan.
 45. Standar Pelayanan Publik, SPP Farmasi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo. 2020
 46. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Pasal 3 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.
 47. Hadi I, Halid S, Idris B.N.A dan Istiana D. Pelaksanaan Sistem Rujukan Eksternal Pasien di Puskesmas Kota Mataram. Jurnal Ilmiah Stikes Yarsi Mataram (JISYM). 2020;10(2).

48. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes. Panduan Praktis BPJS Kesehatan tentang Sistem Rujukan Berjenjang.
49. Sulisna A, Pohan H.D.J dan Meliala A.S. Pengaruh Kebijakan BPJS Kesehatan Tentang Sistem Rujukan Berjenjang Terhadap Penurunan Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Khusus Kota Medan Baru. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Nusantara*. 2023;1(1):20-26.
50. Hasbi F.H. Analisis Hubungan Persepsi Pasien Tentang Mutu Pelayanan Dengan Pemanfaatan Ulang Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas Poncol Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2012;1(2):37-47.
51. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 560/MENKES/SK/IV/2003 Pasal 1 Ayat 4 Tentang Pola Tarif Perjan Rumah Sakit.
52. Sari. Y.A . Sistem Informasi Administrasi Rawat Inap dan Rawat Jalan Pada Puskesmas Bangetayu Semarang. *Jurnal Sistem Informasi*. 2013;1(5).
53. Mulyana, Situmorang Masriani dan Larasty Gevi. Analisis Umum Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan Di Klinik Utama X Tahun 2022. 2023;17(2).
54. dr. H. Mahruzzaman Naim, Sp.A. Alur Pelayanan Pasien BPJS Di Rawat Jalan Rumah Sakit Sari Aceh Karawaci. 2015.
55. Rasnidiati. K.A.P dan Subawa. N.S. Persepsi Pasien Terhadap Terhadap Kualitas Pelayanan Rawat Jalan Pada Puskesmas Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*. 2020;4(1).
56. Bustani. N.M, Rattu.A.J dan Saerang.J.S.M . Analisis Lama Waktu Tunggu Pelayanan Pasien Rawat Jalan Di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal e-Biomedik*. 2015;3(3).
57. Wowor. A.Y dan Siswati. Tinjauan Lama Waktu Tunggu Pelayanan Pasien BPJS Rawat Jalan Klinik Saraf. *Jurnal Kesehatan Tambusai*. 2022;3(1):2774-5848.
58. Herlambang S. Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. Edisi ke-1. Jakarta: Gosyen Publishing; 2016. Hal. 33.

59. Sinamo N. Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik. Jakarta: Jala Permata Aksara; 2019. Hal. 74.
60. Harahap, R.A. Etika dan Hukum Kesehatan. Medan : CV. Merdeka Kreasi Group
61. Ikatan Dokter Indonesia. Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer. Jakarta. 2014
62. Erwin M. Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo; 2012. Hal. 123.
63. Sidharta A, Mauwissen. Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Bandung: PT Refika Aditama; 2007. Hal. 20.
64. M. Agus S. Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana; 2014. Hal. 85.
65. Surajiyo. Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila. Jurnal Universitas Indra Prasta. 2018;2(3).
66. Febryka, Luthvi. Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
67. Pramana., & Priastuty, W. Perspektif Masyarakat Pengguna BPJS Kesehatan Mengenai Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). 2023. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*. 3(1), 30-41
68. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
69. Septiani, A.S., Wigati, P.A., & Fatmasari, E.Y. Gambaran Sistem Antrian Pasien dalam Optimasi Pelayanan di Locket Pendaftaran Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. 2017. *JURNAL Kesehatan Masyarakat*. 5(4), 1-14
70. Kemenkes RI. Perlunya Koordinasi untuk Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/perlunya-koordinasi-untuk-pelayanan-kesehatan-yang-lebih-baik/> Diakses 17 Maret 2024

71. Nujannah, R., Aksa, A.N., & Iddris, M. Manajemen Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan di RSUD Syech Yusuf Kabupaten Gowa. 2017. *Jurnal Administrasi Publik*. 3(1), 63-78
72. Ombudsman RI. Pembatasan Layanan Pasien BPJS Kesehatan Diskriminatif. <https://ombudsman.go.id/news/r/pembatasan-layanan-pasien-bpjs-kesehatan-diskriminatif> Diakses 17 Maret 2024
73. Ombudsman.RI. Obat Tidak Tersedia, Pasien BPJS Berhak Ajukan Penggantian Biaya. <https://ombudsman.go.id/news/r/obat-tidak-tersedia-pasien-bpjs-berhak-ajukan-penggantian-biaya> Diakses 17 Maret 2024
74. Cahyadi. Tindakan nakes 'bedakan pasien BPJS' dikecam publik, 'sangat tidak pantas' - Pegiat: 'Itu bentuk kecurangan dan paling banyak terjadi di rumah sakit'. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn06g268n6vo> Diakses 17 Maret 2024
75. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
76. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
77. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan